BULETIN STUDI EKONOMI
Available online at https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/bse/id
Vol. 31 No. 02, Agustus 2026, pages: 150-163
ISSN : 1410-4628
e-ISSN: 2580-5312

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA

Erna Setiyowati[1]

Article history:

Submitted: 13 Agustus 2026
Revised: 24 Juli 2026
Accepted: 31 Agustus 2026

Keywords:

Capital Expenditure;
Fiscal Independence;
Gross Regional Domestic Product;
Java Island;
Panel Data;

Abstract

Fiscal decentralization since 1999 has not yet fostered regional fiscal independence, as most regencies and municipalities in Java still depend on central government transfers. Capital expenditure is expected to broaden the regional revenue base and stimulate economic activity, yet its share has declined over the past five years. Unlike previous studies that generally examine a single region with a single-equation model, this study jointly analyzes the effects of capital expenditure on fiscal independence and gross regional domestic product (GRDP) using a two-equation panel model of 113 regencies and municipalities in Java for 2021–2025, estimated with a GLS-corrected Fixed Effect Model. Capital expenditure has no significant effect on either fiscal independence or GRDP. Fiscal independence is significantly and positively affected by GRDP per capita and population and negatively by transfers to regions (TKD), while GRDP is significantly and positively affected by fiscal independence, gross fixed capital formation (GFCF), and the labor force. Local governments should therefore improve the quality and targeting of capital expenditure rather than merely increasing its allocation, and strengthen own-source revenue to reduce dependence on transfers.

Kata Kunci:

Belanja Modal;
Data Panel;
Kemandirian Fiskal;
PDRB;
Pulau Jawa;

Abstrak

Desentralisasi fiskal sejak 1999 belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah karena mayoritas kabupaten dan kota di Pulau Jawa masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Belanja modal diharapkan dapat memperluas basis pendapatan daerah dan mendorong aktivitas ekonomi, namun porsinya justru menurun dalam lima tahun terakhir. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji satu wilayah dengan model persamaan tunggal, penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal dan PDRB secara bersamaan menggunakan model panel dua persamaan pada 113 kabupaten dan kota di Pulau Jawa periode 2021–2025, yang diestimasi dengan model *Fixed Effect* terkoreksi GLS. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal maupun PDRB. Kemandirian fiskal dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh PDRB per kapita dan populasi serta secara negatif oleh dana transfer ke daerah (TKD), sedangkan PDRB dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kemandirian fiskal, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan ketepatan sasaran belanja modal, bukan sekadar menambah alokasinya, serta memperkuat penggalian PAD agar ketergantungan pada dana transfer berkurang.

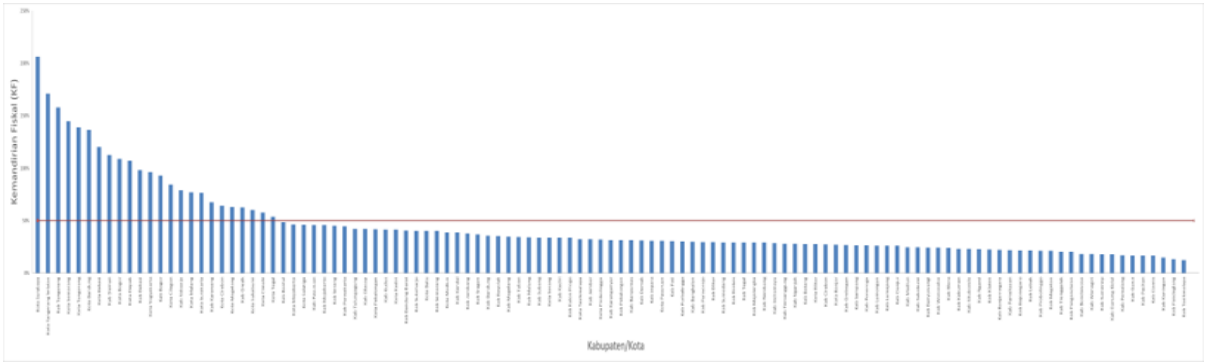
Correspondence:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran
Email:
erna.setiyowati2011@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi dan desentralisasi pasca reformasi telah mengubah secara fundamental pola hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama kebijakan tersebut adalah pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah untuk menjalankan otonominya (Atmoko & Khairudin, 2022), terutama dalam mengelola keuangan daerah, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membelanjakan anggaran sesuai dengan prioritas lokal. Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi yang dimiliki (Purba & Purba, 2022).

Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian dan kontributor dominan PDB nasional, turut mewarnai dinamika pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal yang telah diterapkan termasuk di Pulau Jawa belum mencapai hasil optimal. Desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu mengawal pemerintah daerah mencapai kemandirian yang inklusif. Purba & Purba (2022) dan Yuvanda *et al*. (2025) mengungkapkan bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih bergantung pada dana pusat yang disebabkan oleh belum optimalnya penggalian potensi sumber daya lokal serta minimnya daya tarik investasi. Pada tahun 2025 sekitar 78,76 persen kabupaten/kota di Pulau Jawa (sebanyak 89 dari 113 kabupaten/kota) berada pada kategori kemandirian fiskal rendah dan sangat rendah (Gambar 1).



Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Gambar 1.
Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2025

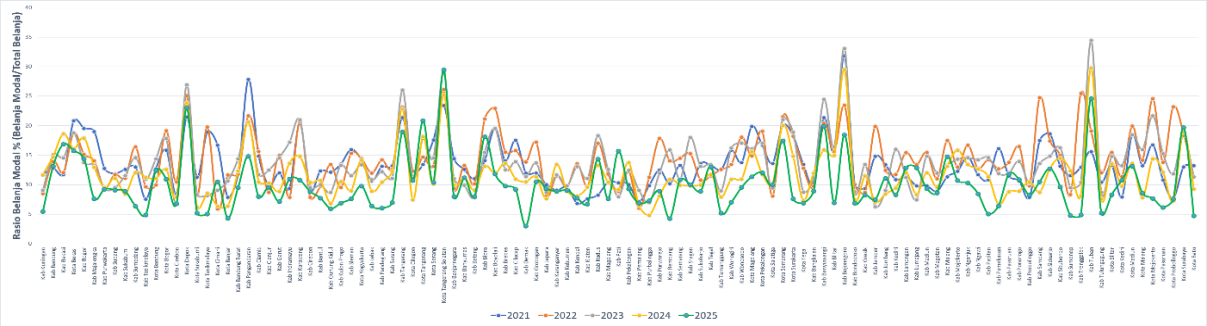
Rendahnya kemandirian tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan daerah pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan regional. Ketika daerah tidak memiliki basis pendapatan internal yang kokoh, kapasitas dan fleksibilitas fiskal daerah dalam membiayai agenda pembangunan, seperti pengadaan fasilitas publik dasar serta penyediaan infrastruktur menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya keterbatasan ini berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, menghambat masuknya investasi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menggali pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah yang strategis dalam mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi daerah adalah alokasi belanja modal. Pengalokasian belanja ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Atmoko & Khairudin, 2022). Oleh karena itu pemerintah perlu mendorong pengalokasian belanja modal untuk mengoptimalkan pelayanan publik guna meningkatkan kemandirian daerah, yang pada akhirnya dapat menstimulasi ekonomi lokal sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

Ditinjau dari perspektif teori ekonomi, belanja modal yang direalisasikan untuk membangun infrastruktur fisik merupakan wujud nyata pengeluaran investasi pemerintah. Dalam Teori Pertumbuhan Endogen, Todaro & Smith (2011) menjelaskan konsep investasi komplementer sebagai investasi yang melengkapi dan memfasilitasi faktor-faktor produktif lainnya. investasi komplementer dapat berupa

pengeluaran/belanja modal dalam bentuk modal manusia, infrastruktur, dan penelitian serta pengembangan. Teori ini menekankan bahwa rendahnya tingkat investasi komplementer menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian investasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui penyediaan barang publik berupa infrastruktur dan mendorong investasi swasta melalui alokasi belanja modal. Dengan adanya investasi komplementer, akan tercipta ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas.

Namun demikian, kendati belanja modal merupakan instrumen yang sangat penting, fakta empiris justru menunjukkan tren rasio belanja modal yang menurun. Berikut disajikan grafik rasio belanja modal kabupaten/kota di Pulau Jawa selama 2021-2025.

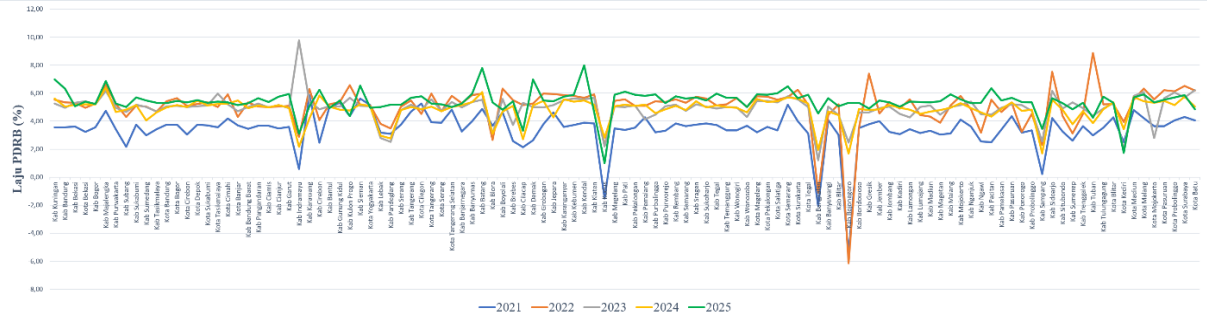


Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025)

Gambar 2.
Rasio Belanja Modal Kabupaten/*Kota* di Pulau Jawa Tahun 2021–2025

Gambar di atas menunjukkan rasio belanja modal pada mayoritas kabupaten/kota di Pulau Jawa terus menurun sejak tahun 2022 dan terendah terjadi pada tahun 2025. Selain tren yang menurun, gambar tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antar daerah, dengan rentang antara 3- 29 persen pada tahun 2025. Ketimpangan alokasi ini mencerminkan perbedaan prioritas pengeluaran antar daerah, di mana sebagian besar kabupaten/kota disinyalir masih menitikberatkan porsi APBD untuk mendanai belanja rutin non-produktif (seperti belanja pegawai). Jika kontraksi belanja modal terus berlanjut, dikhawatirkan berpotensi mengganggu aktivitas pembangunan daerah seperti penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah, pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi cenderung stagnan di kisaran 5 persen sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3, dengan fluktuasi tajam pada beberapa daerah.



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2021–2025

Berdasarkan uraian urgensi belanja modal dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi daerah serta fenomena empiris terkait penurunan rasio belanja modal dan

stagnasi pertumbuhan ekonomi, maka penting untuk menganalisis serta membuktikan secara empiris pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal dan PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai ukuran output ekonomi daerah. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan atau berdampak pada alokasi belanja modal. Urgensi analisis ini semakin relevan dilakukan sehubungan dengan isu kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di tahun 2026 yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola belanjanya. Mengingat mayoritas pendapatan kabupaten/kota di Pulau Jawa ditopang oleh dana perimbangan dari pusat, maka kebijakan pengetatan transfer tersebut dipastikan akan menekan ruang fiskal daerah. Menghadapi keterbatasan fiskal ini, sangat berpotensi direspon oleh pemerintah daerah dengan menekan belanja yang bersifat fleksibel, seperti belanja modal dibandingkan dengan belanja non modal (rutin), seperti belanja pegawai. Tekanan fiskal ini dikhawatirkan akan memperlemah kapasitas pembangunan infrastruktur daerah, melemahkan basis ekonomi lokal, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan.

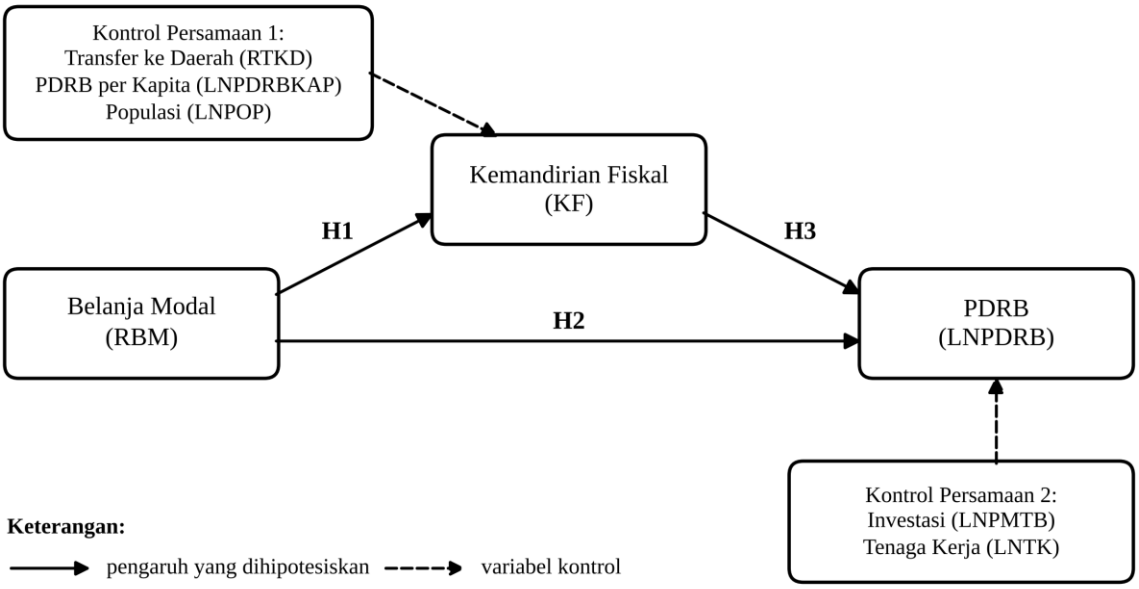
Dalam menganalisis hubungan belanja modal terhadap kemandirian fiskal, selain dana transfer (TKD), terdapat faktor-faktor lain yang diduga turut mempengaruhi, diantaranya PDRB per kapita dan juga populasi yang mencerminkan kapasitas produksi dan basis pendapatan daerah. Dana transfer TKD merupakan komponen dominan pendapatan pada mayoritas daerah sehingga dapat diprediksi peran penting TKD dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Faktor selanjutnya adalah PDRB per kapita yang mencerminkan pendapatan dan kemampuan membayar masyarakat (Muhammad, 2021), serta kesejahteraan masyarakat (Reza & Sopiana, 2023). Faktor lainnya adalah jumlah penduduk atau populasi yang menjadi indikator potensi pasar dan basis pajak daerah melalui aktivitas ekonomi (Mahfudh *et al.*, 2021; Rahman & Restiatun, 2023). Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam model penelitian ini untuk meminimalkan bias pada estimasi.

Di sisi lain dalam menganalisis kausalitas belanja modal dan kemandirian fiskal terhadap PDRB, maka disertakan faktor lain yang diduga turut mempengaruhi yaitu investasi yang diproksikan dalam PMTB dan jumlah tenaga kerja. Keduanya akan menjadi variabel kontrol. Investasi (PMTB) maupun tenaga kerja, merupakan komponen penting faktor produksi dalam peningkatan kapasitas ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan output ditentukan oleh tenaga kerja dan modal serta teknologi (Mankiw, 2022). Menurut pandangan Solow (1956), produktivitas tenaga kerja dan kapasitas produksi ekonomi dapat ditingkatkan melalui investasi yang mendorong akumulasi modal. Keduanya baik modal dan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif (Limbong & Setyari, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran belanja modal dalam keuangan dan perekonomian daerah. Saraswati & Nurharjanti (2021) menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara Atmoko & Khairudin (2022) mengkaji dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada sisi perekonomian, Murti *et al.* (2023), Priambodo & Hidayat (2024), dan Sadid *et al.* (2024) menguji pengaruh belanja modal terhadap PDRB masing-masing di Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan kabupaten/kota di Provinsi NTB, sedangkan Kusuma & Anwar (2024) serta P *et al.* (2026) menganalisis keterkaitan kemandirian atau ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan wilayah Ajatappareng. Penelitian-penelitian tersebut umumnya mencakup satu wilayah administratif dan menganalisis hubungan belanja modal, kemandirian fiskal, dan perekonomian daerah secara terpisah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis ketiga hubungan tersebut secara bersamaan melalui model dua persamaan yang mencakup seluruh 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada periode pascapandemi 2021–2025.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal

kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan mengendalikan dana transfer ke daerah, PDRB per kapita, dan jumlah penduduk. Kedua, bagaimana pengaruh belanja modal dan kemandirian fiskal terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan mengendalikan investasi (PMTB) dan jumlah tenaga kerja. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal, serta pengaruh belanja modal dan kemandirian fiskal terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa. Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah di atas, diajukan tiga hipotesis penelitian. H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Pulau Jawa. H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa. H3: Kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi pengembangan teori fiskal daerah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal secara lebih efektif.



Sumber: Dikembangkan oleh penulis, 2026

Gambar 4.
Kerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2021-2025. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Menggunakan teknik sampling sensus (sampel jenuh), sampel mencakup seluruh anggota populasi, yaitu 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa (tidak termasuk provinsi DKI Jakarta karena bersifat administratif tanpa otonomi) selama periode 2021-2025, sehingga diperoleh data panel seimbang dengan total 565 observasi (113 × 5 tahun).

Penelitian ini menggunakan sistem persamaan simultan *recursive* karena adanya hubungan kausalitas searah yang berjenjang antar variabel endogen dan eksogen. Menurut Syaban & Ratnaningrum (2021), recursivitas menggambarkan hubungan antar variabel yang bersifat searah, di mana tidak diperkenankan adanya putaran balik maupun hubungan timbal balik. Variabel kemandirian fiskal (KF) difungsikan sebagai variabel eksogen sekaligus variabel endogen. Spesifikasi model ekonometrika pada penelitian ini dituangkan sebagai berikut.

Persamaan 1 (Kemandirian Fiskal).

$KF_{it} = a_0 + a_1 RBM_{it} + a_2 RTKD_{it} + a_3 LNPDRBKAP_{it} + a_4 LNPOP_{it} + \varepsilon_{1it}$……..……(1)

Persamaan 2 (PDRB).

$LNPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 KFF_{it} + \beta_2 RBM_{it} + \beta_3 LNPMTB_{it} + \beta_4 LNTK_{it} + \varepsilon_{2it}$……(2)

Definisi operasional variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Variabel dan Definisi Operasional

Variabel / Notasi	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Rumus/Ukuran	Sumber Data
PDRB (LNPDRB)	Dependen	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencerminkan output ekonomi daerah (kabupaten/kota)	Logaritma Natural PDRB (Miliar Rupiah)	BPS
Kemandirian Fiskal (KF)	Dependen	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (kabupaten/kota)	PAD/Total Pendapatan Daerah	DJPK
Kemandirian Fiskal hasil estimasi KF (KFF)	Independen	Nilai estimasi/*fitted value* dari persamaan pertama (KF)	Realisasi hasil estimasi persamaan pertama (KF)	Persamaan pertama
Belanja Modal (RBM)	Independen	Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang menggambarkan komposisi belanja daerah terhadap seluruh belanja (kabupaten/kota)	Belanja Modal/Total Belanja	DJPK
Transfer ke Daerah (RTKD)	Kontrol	Rasio TKD terhadap total pendapatan daerah	TKD/Total Pendapatan Daerah	DJPK
PDRB Per Kapita (LNPDRBKAP)	Kontrol	Nilai PDRB per kapita kabupaten/kota	Logaritma Natural (Juta Rupiah) PDRB/Jumlah Penduduk	BPS
Populasi (LNPOP)	Kontrol	Jumlah penduduk kabupaten/kota	Logaritma natural jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	BPS
Tenaga Kerja (LNTK)	Kontrol	Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu (sebelum pencacahan, sesuai dengan konsep Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)) Badan Pusat Statistik.	Logaritma natural jumlah tenaga kerja (Jiwa)	BPS
Investasi (LNPMTB)	Kontrol	Nilai PMTB berdasarkan pengeluaran ADHK	Logaritma Natural PMTB (Miliar Rupiah)	BPS

Sumber: Diolah penulis dari Badan Pusat Statistik (2025a, 2025b) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025)

Estimasi data panel dilakukan dengan menyeleksi model terbaik di antara *Common Effect (CEM), Fixed Effect (FEM),* dan *Random Effect (REM)* melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah model terpilih selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik mencakup uji multikolinearitas (koefisien korelasi), uji autokorelasi (Durbin–Watson), dan uji heteroskedastisitas (Glejser). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2), uji F-statistik (simultan), dan uji t-statistik (parsial). Analisis estimasi diolah dengan perangkat lunak EViews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	Satuan	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Rasio Belanja Modal	Rasio	0,13	0,12	0,34	0,03	0,05
Kemandirian Fiskal	Rasio	0,24	0,20	0,69	0,07	0,11
PDRB	Miliar Rp	46724,55	27296,93	513934,5	3371,78	60462,28
Rasio TKD	Rasio	0,66	0,70	0,85	0,26	0,12
PDRB per kapita	Juta Rupiah	37,61	24,16	320,12	12,76	37,67
Populasi	Ribu Jiwa	1281,9	1124,7	5721,6	121,61	854,98
PMTB	Miliar Rp	12437,47	6531,67	133767,6	911,69	16986,61
Tenaga kerja	Jiwa	652714,9	592403	2651716	60317	406619,6

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan analisis deskriptif pada tabel di atas, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah hanya sebesar 13 persen, dengan kisaran antara 3 persen hingga 34 persen, mengindikasikan bahwa porsi belanja modal dalam APBD kabupaten/kota di Pulau Jawa masih relatif rendah dan bervariasi antar daerah. Rata-rata kemandirian fiskal tercatat sebesar 24 persen dengan rentang 7 hingga 69 persen, yang menegaskan bahwa mayoritas daerah masih berada pada kategori kemandirian rendah, sementara rata-rata rasio dana transfer ke daerah (TKD) mencapai 66 persen dengan puncak 85 persen, mengkonfirmasi tingginya ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat. PDRB per kapita menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi antar daerah dengan rata-rata Rp37,61 juta dan rentang antara Rp12,76 juta hingga Rp320,12 juta. Demikian pula, variabel PMTB dan tenaga kerja memiliki standar deviasi yang jauh lebih besar daripada nilai rata-ratanya, menandakan disparitas kapasitas investasi dan sumber daya manusia yang sangat signifikan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa. Secara keseluruhan, variasi data yang tinggi antar daerah ini mengindikasikan adanya heterogenitas karakteristik ekonomi dan fiskal yang substansial, sehingga penggunaan metode estimasi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi tepat untuk mengakomodasi perbedaan individu antar daerah dalam analisis.

Langkah awal dalam estimasi panel data adalah pemilihan model. Pertama dilakukan uji Chow guna memilih model antara CEM dan FEM (Algifari, 2021; Wahyudi, 2023).

Tabel 3.
Hasil Uji Chow

Persamaan	d.f.	*Cross-section* F	Prob.	Kesimpulan
Persamaan 1 (KF)	(112, 448)	11,640	0,000	FEM
Persamaan 2 (PDRB)	(112, 448)	569,709	0,000	FEM

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa pada kedua persamaan mempunyai *p-value* < α=0,05 atau 5 persen sehingga menolak H_0, dan dapat disimpulkan bahwa estimasi dengan FEM lebih baik daripada

CEM. Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk melihat antara model FEM dan REM (Algifari, 2021; Wahyudi, 2023).

Tabel 4.
Hasil Uji Hausman

Persamaan	Chi-Sq. d.f.	Chi-Sq. Statistic	Prob.	Kesimpulan
Persamaan 1 (KF)	4	620,605	0,000	FEM
Persamaan 2 (PDRB)	4	17,327	0,002	FEM

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil uji menunjukkan pada kedua persamaan memiliki *probability* < α=0,05 atau 5 persen sehingga menolak H_0, dengan demikian kesimpulannya adalah estimasi dengan FEM lebih baik daripada REM. Berdasarkan kedua uji tersebut, maka model terbaik pada kedua persamaan penelitian ini adalah FEM.

Langkah selanjutnya yaitu uji asumsi klasik agar memperoleh estimator yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Algifari, 2021). Uji ini mencakup uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut hasil uji multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Persamaan 1 (KF)	RBM	RTKD	LNPDRBKAP	LNPOP
RBM	-	-0,348	0,175	0,099
RTKD	-0,348	-	-0,606	-0,173
LNPDRBKAP	0,175	-0,606	-	-0,174
LNPOP	0,099	-0,173	-0,174	-

Persamaan 2 (PDRB)	KFF	RBM	LNPMTB	LNTK
KFF	-	0,285	0,657	0,120
RBM	0,285	-	0,249	0,097
LNPMTB	0,657	0,249	-	0,613
LNTK	0,120	0,097	0,613	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Hasil uji pada kedua persamaan menunjukkan nilai koefisien korelasi pada seluruh variabel <0,8 sehingga kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji Autokorelasi menggunakan Durbin Watson dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

Persamaan	DW stat	dL	dU	4-dL	4-dU	Kesimpulan
Persamaan 1 (KF)	2,114	1,853	1,879	2,147	2,121	Tidak ada masalah autokorelasi
Persamaan 2 (PDRB)	1,145	1,853	1,879	2,147	2,121	Autokorelasi positif

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Pada persamaan pertama, nilai DW-stat berada antara dU dan 4-dU sehingga persamaan pertama terbebas dari masalah autokorelasi. Sedangkan pada persamaan kedua, nilai DW-stat berada antara 0 dan dL yang dapat diasumsikan bahwa persamaan kedua mengandung masalah autokorelasi positif. Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Prob varindependen	Persamaan 1 (KF)	Persamaan 2 (PDRB)	Hasil α=0,05	Kesimpulan
RBM	0,115		Prob > α	-
RTKD	0,000		Prob < α	Heterokedastisitas
LNPDRBKAP	0,002		Prob < α	Heterokedastisitas
LNPOP	0,444		Prob > α	-
KFF		0,002	Prob < α	Heterokedastisitas
Prob varindependen	**Persamaan 1 (KF)**	**Persamaan 2 (PDRB)**	**Hasil α=0,05**	**Kesimpulan**
RBM		0,339	Prob > α	-
LNPMTB		0,269	Prob > α	-
LNTK		0,005	Prob < α	Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Pada tingkat signifikansi 5 persen, kedua persamaan teridentifikasi mengandung masalah heterokedastisitas, dimana pada persamaan pertama disebabkan oleh variabel dana transfer (TKD) dan PDRB per kapita (PDRBKAP), sedangkan pada persamaan kedua disebabkan oleh kemandirian fiskal (KFF) dan tenaga kerja (TK).

Dari serangkaian hasil uji diagnostik yang telah dilakukan, ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas pada persamaan pertama, sedangkan pada persamaan kedua ditemukan masalah heterokedastisitas dan autokorelasi. Dalam Wooldridge (2020) untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi tersebut, dilakukan koreksi menggunakan *Generalized Least Squares (GLS)*. Berikut hasil estimasi penelitian dengan menggunakan model *Fixed Effect* yang telah dilakukan koreksi (GLS).

Tabel 8.
Nilai R^2 Hasil Regresi

Nilai	Persamaan 1 (KF)	Persamaan 2 (PDRB)
R-squared	0,982	0,9998
Adjusted *R-squared*	0,978	0,9997

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Pada persamaan pertama diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,982, sedangkan pada persamaan kedua sebesar 0,9998. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel dependen pada kedua persamaan dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh model. Namun, nilai R^2 tersebut berasal dari statistik terbobot (*weighted statistics*) hasil estimasi GLS pada model *Fixed Effect* yang memuat efek individu setiap kabupaten/kota, sehingga nilainya cenderung tinggi dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan R^2 hasil estimasi OLS biasa.

Tabel 9.
Uji F-stat pada Model Estimasi

Persamaan	F-statistik	Prob.	Kesimpulan
Persamaan 1 (KF)	214,32	0,000	Signifikan
Persamaan 2 (PDRB)	16266,96	0,000	Signifikan

Keterangan: F-tabel = 3,361 (α = 1%); 2,392 (α = 5%); 1,957 (α = 10%).
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Nilai F-hitung pada persamaan pertama dan kedua masing-masing adalah 214,32 dan 16266,96. Nilai tersebut > F-tabel pada tingkat signifikansi 1 persen, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen baik pada persamaan pertama maupun kedua.

Tabel 10.

Uji T-stat pada Model Estimasi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Persamaan 1 (KF)				
C	-4,101***	0,508	-8,080	0,000
RBM	-0,032	0,020	-1,616	0,107
RTKD	-0,745***	0,027	-27,147	0,000
LNPDRBKAP	0,234***	0,019	12,547	0,000
LNPOP	0,584***	0,081	7,214	0,000
Persamaan 2 (PDRB)				
C	1,717***	0,142	12,130	0,000
KFF	0,242***	0,042	5,839	0,000
RBM	0,003	0,025	0,135	0,892
LNPMTB	0,810***	0,016	50,160	0,000
LNTK	0,099***	0,014	7,216	0,000

Keterangan: *** signifikan pada α = 1%; ** α = 5%; * α = 10%. t-tabel = 2,585 (1%); 1,964 (5%); 1,648 (10%).
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Selanjutnya berdasarkan hasil uji t, pada persamaan pertama (KF), dari empat variabel bebas yang diestimasi, tiga variabel memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel sehingga signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1 persen, yaitu RTKD, LNPDRBKAP, dan LNPOP. Sementara, variabel RBM memiliki t-stat < t-tabel, sehingga tidak terbukti berpengaruh signifikan. Dengan demikian, variabel yang dinyatakan berpengaruh terhadap KF adalah RTKD, LNPDRBKAP, dan LNPOP. Selanjutnya pada persamaan kedua (PDRB), dari empat variabel bebas yang diestimasi, tiga variabel memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel pada tingkat signifikansi 1 persen, yaitu KFF, LNPMTB, dan LNTK. Sementara itu, variabel RBM memiliki t-stat < t-tabel, sehingga tidak terbukti berpengaruh signifikan. Dengan demikian, variabel yang dinyatakan berpengaruh terhadap PDRB adalah KFF, LNPMTB, dan LNTK.

Pada persamaan pertama (Kemandirian Fiskal), variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal dengan koefisien -0,032 dengan probabilitas lebih besar dari α. Peran belanja modal belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal di wilayah Pulau Jawa. Pemerintah daerah masih relatif lemah dalam membiayai pembangunan. Di sisi lain alokasi belanja modal yang relatif rendah, dan tidak tepat sasaran, serta bersifat konsumtif tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga tidak dapat mendorong kemandirian keuangan daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Saraswati & Nurharjanti (2021).

Variabel dana transfer (TKD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal dengan koefisien -0,7449 pada tingkat signifikansi 1 persen. Nilai tersebut menunjukkan setiap kenaikan 1 persen rasio TKD, maka kemandirian fiskal akan turun 0,745 persen (*ceteris paribus*). Pengaruh negatif dana transfer terhadap kemandirian fiskal menunjukkan bahwa peningkatan transfer dari pemerintah pusat cenderung memperbesar ketergantungan fiskal daerah dan melemahkan insentif untuk mengoptimalkan PAD. Dana transfer dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatannya, daerah lebih mengandalkan bantuan dari pusat daripada menggali potensi pendapatannya sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian Zahro *et al*. (2025) menyatakan bahwa daerah yang terlalu banyak melakukan belanja dan pengeluaran dengan dana perimbangan, sering mengabaikan potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam membantu penerimaan daerah. TKD menyebabkan daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat sehingga menurunkan kemandirian daerah.

Variabel PDRB per kapita (PDRB/kapita) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pada tingkat signifikansi 1 persen dengan nilai koefisien 0,234. Kenaikan 1 persen PDRB/kapita, akan meningkatkan kemandirian fiskal sebesar 0,234 persen (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad (2021) yang menunjukkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap PAD serta penelitian Reza & Sopiana (2023) terhadap

kemandirian fiskal. Peningkatan PDRB per kapita mengindikasikan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan kemampuan membayar (*ability to pay*) atas berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Studi Muhammad (2021) menyebutkan kemampuan membayar (*ability to pay*) atas pungutan pajak daerah secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan tersebut berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Reza & Sopiana, 2023).

Variabel populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal dengan koefisien 0,584 pada tingkat signifikansi 1 persen. Nilai koefisien tersebut menunjukkan setiap kenaikan 1 persen populasi, menaikkan kemandirian fiskal sebesar 0,584 persen (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman & Restiatun (2023) dan Mahfudh *et al*. (2021). Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan pajak/retribusi daerah yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Besaran jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan daerah akibat adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Rahman & Restiatun (2023) menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang lebih besar akan mendorong peningkatan konsumsi yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Kondisi tersebut diperkuat oleh Mahfudh *et al*. (2021) yang menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka pengeluaran konsumsi juga semakin meningkat meskipun pengeluaran rata-rata bisa lebih kecil. Mahfudh *et al*. (2021) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk usia produktif dan penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin mendorong peningkatan konsumsi, karena akan semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja dan pola hidup diperkotaan yang konsumtif. Penelitian Rahman & Restiatun (2023) menunjukkan bahwa semua kategori pajak daerah (seperti pajak hotel, restoran, hiburan) dan jumlah penduduk merupakan tertinggi di perkotaan.

Pada persamaan kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang mencakup Kemandirian Fiskal hasil estimasi persamaan pertama (KFF), Belanja Modal (BM), investasi berupa PMTB, dan jumlah tenaga kerja (TK) terhadap PDRB kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2021-2025.

Kemandirian fiskal merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal, semakin besar ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Hasil estimasi kemandirian fiskal (KFF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan koefisien 0,242 pada tingkat signifikansi 1 persen. Setiap kenaikan 1 persen KFF yang telah diestimasi pada persamaan sebelumnya akan meningkatkan PDRB sebesar 0,242 persen (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran dari sumber pendapatan secara mandiri, semakin tinggi pula output ekonomi daerah yang dapat dicapai. Temuan Kusuma & Anwar (2024) mendukung hasil penelitian ini bahwa kemandirian fiskal terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh P *et al.* (2026). Kemandirian fiskal terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas keuangan daerah sehingga daerah dapat mengembangkan program-program strategis yang mampu mendorong perekonomian pada wilayah tersebut. Teori Oates (1972) menjelaskan pemerintah lokal (desentralisasi) memainkan peran lebih penting daripada pemerintah pusat dalam menyediakan layanan publik yang efisien (Thanh & Canh, 2020). Semakin mandiri suatu daerah maka semakin besar fleksibilitas daerah dalam melakukan pembangunan ekonominya.

Variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil regresi penelitian ini menunjukkan alokasi belanja modal yang rendah untuk kegiatan pembangunan fasilitas publik sehingga belum berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Murti *et al*. (2023), Sadid *et al*. (2024), dan Priambodo & Hidayat (2024). Belum berpengaruhnya

belanja modal terhadap PDRB disebabkan oleh besarnya alokasi belanja konsumtif dan belanja modal tidak seimbang sehingga belanja modal belum mampu mendorong PDRB. Beberapa jenis belanja modal seperti infrastruktur membutuhkan waktu dalam pembangunannya sehingga tidak bisa langsung berdampak pada PDRB.

Variabel Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,810 pada tingkat signifikansi 1 persen, yang artinya setiap kenaikan 1 persen PMTB akan meningkatkan PDRB sebesar 0,810 persen (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini sejalan dengan Firdaus *et al.* (2021), Kesuma & Astuti (2021), dan Agustin & Sakti (2025). PMTB akan mendorong efisiensi produksi, peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan efek *multiplier* (Agustin & Sakti, 2025). Namun, perlu dicatat bahwa PMTB merupakan salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran, sehingga sebagian hubungan antara keduanya bersifat definisional dan besaran koefisien ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati.

Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan koefisien 0,099 pada tingkat signifikansi 1 persen yang artinya setiap kenaikan 1 persen tenaga kerja, maka akan meningkatkan PDRB 0,099 persen (*ceteris paribus*). Hasil penelitian ini sejalan dengan Hastin (2022) dan Lazuardi & Muttaqin (2023). Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi penting yang menggerakkan perekonomian sebagaimana teori pertumbuhan ekonomi Solow (Lazuardi & Muttaqin, 2023). Peningkatan tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Hastin, 2022). Tenaga kerja berkontribusi besar di Pulau Jawa, sehingga peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor dominan secara langsung mendorong pertumbuhan PDRB.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode penelitian yang relatif pendek (2021-2025) mungkin belum cukup untuk menangkap efek jangka panjang belanja modal. Kedua, variabel kontrol yang digunakan masih terbatas. Masih ada kemungkinan variabel lain yang mempengaruhi kemandirian fiskal dan PDRB, namun tidak dimasukkan dalam model, seperti tingkat korupsi, kualitas birokrasi, stabilitas politik daerah, kapasitas sumber daya manusia aparatur. Padahal, faktor-faktor institusional tersebut sangat mempengaruhi efektivitas belanja modal. Ketiga, penggunaan data tahun 2025 yang berpotensi belum final dapat mempengaruhi temuan khususnya pada pola alokasi belanja modal di tahun 2025, sehingga hasil yang menggambarkan penurunan belanja modal perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikonfirmasi dengan data final setelah tahun anggaran berakhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2021–2025, penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal maupun PDRB. Pada persamaan pertama, kemandirian fiskal dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB per kapita dan populasi, sedangkan dana transfer ke daerah (TKD) berpengaruh negatif dan signifikan. Pada persamaan kedua, PDRB dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kemandirian fiskal, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan tenaga kerja. Dengan demikian, H1 dan H2 ditolak karena belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal maupun PDRB, sedangkan H3 diterima karena kemandirian fiskal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal di Pulau Jawa masih belum efektif sebagai instrumen untuk mendorong kemandirian fiskal dan output ekonomi daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja modal, bukan sekadar meningkatkan alokasinya. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat desain mekanisme penyaluran dana transfer agar lebih memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD. Pemerintah pusat juga harus berperan aktif memberikan asistensi

intensif kepada pemerintah daerah dalam penggalian potensi PAD, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang masih rendah. Selanjutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah untuk mendorong penyebaran investasi yang lebih merata sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang sudah maju. Terakhir, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja, guna memastikan bahwa potensi jumlah penduduk yang besar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel TKD yang lebih spesifik dengan memisahkannya menjadi DAU, DAK, dan DBH agar efek dari masing-masing jenis dana transfer dapat dipetakan secara lebih tepat. Penelitian mendatang juga disarankan memasukkan variabel kualitas tata kelola pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas belanja modal secara lebih holistik. Selain itu, memperpanjang rentang waktu penelitian dan memasukkan variabel *time lag* untuk menangkap efek jangka panjang dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih konsisten.

REFERENSI

Agustin, R. A., & Sakti, R. K. (2025). Analysis of economic growth and income inequality among province in Indonesia 2018–2022. *Journal of Development Economic and Social Studies, 4*(1), 238–252. https://doi.org/10.21776/jdess.2025.04.1.18

Algifari. (2021). *Pengolahan data panel untuk penelitian bisnis dan ekonomi dengan EViews 11* (Ed. 1). UPP STIM YKPN.

Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10*(2), 291–296. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Jumlah penduduk kabupaten/kota di Pulau Jawa*. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2025b). *PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) menurut pengeluaran kabupaten/kota (miliar rupiah)*. https://www.bps.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Postur APBD*. Kementerian Keuangan. Diakses 22 Oktober 2025, dari https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Firdaus, I., Nuryartono, N., & Barreto, R. (2021). Impact of fiscal decentralisation on economic growth and poverty reduction in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, 8*(1), 176–185. https://doi.org/10.32628/IJSRSET218130

Hastin, M. (2022). Pengaruh inflasi, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Journal Al Dzahab, 3*(1), 61–78. https://doi.org/10.32939/dhb.v3i1.1122

Kesuma, M. N., & Astuti, E. T. (2021). Kajian indeks modal manusia dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015–2018. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020*(1), 817–824. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.523

Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 2*(2), 223–233. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14

Lazuardi, A. S., & Muttaqin, A. A. (2023). Pengaruh jumlah tenaga kerja, IPM, dan IPTIK terhadap pertumbuhan ekonomi. *Journal of Development Economic and Social Studies, 2*(3), 475–488. https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.02

Limbong, O. P., & Setyari, N. P. W. (2026). Pengaruh penanaman modal asing dan tenaga kerja terhadap pembangunan inklusif di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi, 31*(1), 76–86. https://doi.org/10.24843/BSE.2026.v31.i01.p07

Mahfudh, Saleh, H., & Yusuf Saleh, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. *Indonesian Journal of Business and Management, 3*(2), 106–114.

Mankiw, N. G. (2022). *Macroeconomics* (11th ed.). Worth Publishers.

Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh dana perimbangan, PDRB per kapita, tax effort, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011–2017). *Diponegoro Journal of Economics, 10*(2), 1–9. https://doi.org/10.14710/djoe.31596

Murti, F. R., Tan, S., & Zulfanetti, Z. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap PDRB dan hubungannya dengan kemiskinan di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika, 18*(2), 12–31. https://doi.org/10.22437/jpe.v18i2.14085

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

P, A. A. A. A., Agit, A., Latifah, M., & Suhartono, S. (2026). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Ajatappareng. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4*(2), 4738–4749. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1021

Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap PDRB dan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8*(1), 1–14. https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i1.2279

Purba, S., & Purba, K. (2022). Tata kelola pemerintahan pusat dalam pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 22*(2), 171–190. https://doi.org/10.25105/mraai.v22i2.15103

Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap pendapatan asli daerah di Kalimantan Barat. *Sebatik, 27*(2), 699–707. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2370

Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB perkapita, investasi pemerintah, dan inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 6*(1), 477–488. https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2609

Sadid, M. A., Hailuddin, H., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis pengaruh investasi penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto di kabupaten/kota Provinsi NTB tahun 2018–2022. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship), 5*(2), 209–215. https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i2.660

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Prosiding BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2*, 51–64.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Syaban, M., & Ratnaningrum, E. (2021). *Statistika penelitian*. Informatika Bandung.

Thanh, S. D., & Canh, N. P. (2020). Fiscal decentralization and economic growth of Vietnamese provinces: The role of local public governance. *Annals of Public and Cooperative Economics, 91*(1), 119–149. https://doi.org/10.1111/apce.12255

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi* (Jilid 1, Ed. 11). Erlangga.

Wahyudi, S. T. (2023). *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan EViews*. PT RajaGrafindo Persada.

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.

Yuvanda, S., Rachmad, M., & Herlin, F. (2025). Determinasi derajat desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi daerah: Studi empiris kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 14*(2), 525–532. https://doi.org/10.22437/jmk.v14i2.43656

Zahro, H., Suriadi, I., & Hailuddin. (2025). Pengaruh fiscal stress, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2018–2022. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship), 6*(2), 339–345. https://doi.org/10.29303/alexandria.v6i2.715